



## LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI

**Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

=====  
Tahun Sidang : 2014-2015  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke : 1  
Jenis Rapat : Audiensi  
Sifat rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Kamis, 15 Januari 2015  
Waktu : 14.30 – 16.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)  
Rapat dengan : Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur  
Acara : Membahas pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Provinsi Jawa Timur  
Ketua Rapat : Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA.  
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto,SH  
Hadir : 25 Anggota dari 44 Anggota Komisi VIII DPR RI

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

#### I. PENDAHULUAN

1. Audiensi Komisi VIII DPR RI, Kamis, 15 Januari 2015 dibuka pukul 14.30 WIB, dan di Pimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk. Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum.,MA., Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan Agenda Audiensi mengenai pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Provinsi Jawa Timur.

## II. PEMBAHASAN

1. Pendahuluan
2. Paparan maksud dan tujuan kedatangan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Audiensi Komisi VIII DPR RI dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur tentang **“Pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Provinsi Jawa Timur”**, maka dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur menyampaikan beberapa masalah terkait pendistribusian KIS dan KIP antara lain:
  - a. Masalah data dari Dinas Sosial dengan yang ada di Kantor Pos Surabaya jauh berbeda
  - b. Dari keterangan Menteri Sosial diperoleh informasi bahwa validasi data terbentur karena anggaran yang tidak dianggarkan pada anggaran sebelumnya. Baru akan dianggarkan pada RAPBN-P.
  - c. Di setiap kartu yang terdistribusi terdapat 3 provider kartu perdana: XL, Telkomsel dan Indosat (IM3).
  - d. Meminta dukungan Komisi VIII DPR-RI terkait solusi dari ketiga masalah tersebut.
2. Tanggapan anggota Komisi VIII DPR-RI:
  - a. Kebijakan KIS dan KIP tidak hanya berdimensi sosial tetapi juga terdapat dimensi bisnis. Oleh karena itu harus dikaji lebih lanjut: sumber dana pengadaan kartu, mekanisme pengadaan, jumlah anggaran, serta kesinambungan penggunaan kartu.
  - b. Koordinasi instansi yang terlibat dalam proses pendistribusian KIS dan KIP, antara lain: Kementerian Sosial, BPS, Pemerintah Daerah, PT Pos Indonesia, TNP2K, dan Bank Mandiri.
  - c. Masalah pelayanan distribusi bagi penerima bantuan KIP dan KIS bagi Lansia.
  - d. Perlu dikaji ulang kebijakan mengenai KIP dan KIS dengan alternatif: dilakukan perbaikan, dihentikan, atau diganti dengan program lain.
  - e. Program KIP dan KIS disinergikan dengan program yang sudah ada, seperti BPJS.
  - f. Masalah pendataan penerima KIS dan KIP:
    - 1) Komisi VIII DPR-RI perlu mendesak pemerintah untuk memperbaharui data penerima KIP dan KIS yang sudah usang, yaitu data tahun 2011.
    - 2) Mengenai pendataan, perlu mencontoh dari Kabupaten Sragen, di mana database dari tingkat desa hingga kabupaten tidak tumpang-tindih.
    - 3) Diperlukan keterlibatan aktif Pemerintahan Daerah mengenai pendataan termasuk dalam penganggaran yang bisa dimasukkan ke APBD, tidak mengandalkan dari pemerintah pusat.
    - 4) Diperlukan sinergi dengan data dari BKKBN.
  - g. Diusulkan untuk melakukan Kunjungan Kerja khusus ke Surabaya dan Banyuwangi bersama dengan Komisi E DPRD Jawa Timur sehingga dapat diperoleh gambaran yang nyata di lapangan terkait masalah KIP dan KIS.

3. Tambahan keterangan dari Komisi E DPRD:
  - a. Tidak ada koordinasi di tingkat daerah terkait pendataan maupun distribusi.
  - b. Mengenai provider kartu perdana di KIP dan KIS, Komisi E DPRD Jatim sudah menyampaikan ke Menteri Sosial tetapi belum ada jawaban.
  - c. Perlu didorong SKB 3 Menteri terkait pendistribusian KIP dan KIS.
  
4. Komisi VIII DPR-RI akan **menindaklanjuti** permasalahan pendistribusian KIP dan KIS melalui fungsi pengawasan yang selanjutnya hasilnya akan dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Sosial RI.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 15 Januari 2015

AN.KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,

Ttd.

YANTO SUPRIYANTO  
NIP. 196305241992031001